

PERANAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*(The Role of Local Governments in Development Policy Micro Small and Medium
Enterprises in the Province of Yogyakarta)*

Dewi Wuryandani*
Hilma Meilani**

Naskah diterima 8 Maret 2013
Naskah diterbitkan: 27 Juni 2013

Abstract

The Micro, Small, And Medium Enterprises in Indonesia play an important role in improving the nation's economy and help the government program because they are labor-intensive effort that require a lot of labor. The Province of Yogyakarta, which has the potential of human resources both in terms of academic and non academic background, is a source of young entrepreneur candidates who are creative and innovative. But with less support and encouragement from the local government, the potential will be a constraint. Several problems are still being faced by Micro, Small, And Medium Enterprises in Yogyakarta, include (1) marketing, (2) the capital and funding, (3) innovation and utilization of information technology, (4) availability of raw materials, (5) production equipment, (6) absorption and empowerment of labor, (7) the business development plan, and (8) readiness against external environment. There are still overlapping in term of policies between regions, and between the central and local governments. It is therefore, the local government needs to create a conducive environment for the Micro, Small, And Medium Enterprises so that they can produce export-quality products.

Key word: *entrepreneur, Micro, Small, and Medium Enterprises, policy, local government*

Abstrak

Keberadaan UMKM di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan membantu program pemerintah karena merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang potensial dari segi akademis, merupakan sumber calon-calon *entrepreneur* muda yang kreatif dan inovatif. Namun tanpa dukungan dan dorongan yang maksimal dari pemerintah daerah, hal tersebut akan menjadi kendala. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi oleh UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah (1) pemasaran, (2) modal atau pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) ketersediaan bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan eksternal. Masih adanya tumpang tindih kebijakan antar daerah, juga antar daerah dan pusat, sehingga pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas ekspor.

Kata Kunci: UMKM, kebijakan, pemerintah daerah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyebab tingginya sektor informal di Indonesia adalah beratnya beban yang harus ditanggung oleh pengusaha akibat kebijakan yang berlaku. Bahkan hampir 30 persen dari perusahaan-perusahaan di Indonesia memulai kegiatan usahanya tanpa mendaftarkan diri secara formal.¹ Semakin meningkatnya daya saing ekonomi tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha dalam negeri yang berskala mikro, kecil dan menengah.

Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang mengatur kegiatan usaha. Dari peraturan-peraturan yang ada tentunya ada yang memudahkan dan ada

pula yang menghambat. Keberadaan usaha kecil merupakan konsekuensi logis upaya transformasi sosial, ekonomi dan politik dari sistem perekonomian yang mengandalkan pada sektor pertanian menuju pada basis ekonomi nonpertanian. Perubahan tersebut terjadi karena semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, kesempatan kerja, dan penghasilan yang lebih baik serta semakin meningkatnya modal.²

Doing Business di Indonesia tahun 2012 menemukan bahwa 14 kota yaitu Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Manado, Palangka Raya, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta yang telah disurvei telah memperbaiki proses pendaftaran usaha mereka dalam periode dua tahun terakhir. Laporan

* Alamat Penulis di P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik Jl. Jend. Gatot Subroto, Gedung Nusantara 1, lantai 2 Sekretariat Jenderal DPR RI dan email di: dewi.wuryandani@gmail.com.

** Alamat Penulis di P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik Jl. Jend. Gatot Subroto, Gedung Nusantara 1, lantai 2 Sekretariat Jenderal DPR RI dan email di: h_meilani@yahoo.com.

¹ "DB2012 Report", (http://www.kppod.org/datapdf/laporan/DB2012Report_Ind.pdf, diakses 3 Maret 2013).

² Sjaifudian, Hetifah, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, (Penerbit: Yayasan Akatiga, Bandung, 1995), hal. 1.

terbaru dari *The International Finance Corporation* (IFC) dan Bank Dunia mencatat bahwa reformasi kebijakan usaha yang dilakukan sejumlah kota di Indonesia telah membuahkan hasil. Reformasi tersebut mempermudah para pengusaha domestik untuk mendirikan dan menjalankan usahanya.

Di seluruh Indonesia, posisi kota dengan proses termudah untuk mendirikan usaha diduduki oleh Yogyakarta, untuk mengurus izin-izin mendirikan bangunan diduduki oleh Balikpapan, dan untuk mendaftarkan properti diduduki oleh Bandung dan Jakarta. Manado merupakan kota dengan proses tersulit untuk mendirikan usaha dan untuk mendaftarkan properti diduduki oleh Kota Batam. Posisi kota dengan proses tersulit untuk mengurus izin-izin mendirikan bangunan diduduki oleh Jakarta, sementara Gorontalo tidak ada penerbitan izin mendirikan bangunan untuk gudang komersil sejak tahun 2008. Menurut Stefan G. Koeberle, *Country Director* Bank Dunia untuk Indonesia mengungkapkan bahwa di seluruh dunia proyek *Doing Business* telah menunjukkan penyederhanaan prosedur dan biaya untuk mendirikan usaha memiliki peranan penting

terdesentralisasi yang perancangan dan pelaksanaan kebijakan secara harmonis di tingkat daerah merupakan kunci pendorong perkembangan usaha dalam negeri skala kecil hingga menengah.

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiannya (SDM).⁴ Pada tahun 2010-2011, kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) semakin bertambah seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pengusaha baru UMKM di Indonesia. Kurun waktu tahun 2010-2011 jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat peningkatan sebesar 2,33 persen dari 99.401.775 orang pada tahun 2010 menjadi 101.722.458 orang pada tahun 2011.⁵

Tabel 1. Perbandingan Komposisi Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Usaha pada Tahun 2010-2011

No.	Skala Usaha	2010 (Rp miliar)	2011 (Rp miliar)	Pertumbuhan (persen)
1.	Usaha Mikro	2.051.878,0	2.579.388,4	25,71
2.	Usaha Kecil	597.770,2	722.012,8	20,78
3.	Usaha Menengah	816.745,1	1.002.170,3	22,70
	Total	3.466.393,3	4.303.571,5	24,15

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (diolah).

dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah domestik.³ Oleh karena itu, penting bagi Indonesia, supaya usaha kecil dan menengah dapat menjadi tulang punggung perekonomian, dalam meningkatkan kualitas kebijakan usaha, dalam upaya meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya kemudahan untuk melakukan usaha dan kegiatan investasi juga membantu mendorong terselenggaranya urbanisasi yang berkelanjutan, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pendirian dan pengoperasian usaha, di mana kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku lebih membawa manfaat dibandingkan dengan pembebanan biaya dalam mencapai sasaran. Hal ini mengingat karena Indonesia merupakan negara yang

Beberapa masalah umum yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan usahanya, antara lain: (1) pemasaran, (2) modal dan pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) pemakaian bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal.⁶

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal juga sebagai kota yang kreatif. Banyaknya potensi yang dimiliki masyarakatnya membuat daerah Yogyakarta semakin diminati sebagai tempat berkembangnya usaha mikro kecil menengah. Namun dalam

³ "Kebijakan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia Membaik", (http://bkppm.surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=142%3Akebijakan-usaha-bagi-usaha-kecil-dan-menengah-di-indonesia-membaik&catid=34%3Aberita-media-massa&Itemid=66&lang=in, diakses 3 Maret 2013).

⁴ Mohammad Jafar Hafsah, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)". *Infokop*, No. 25 Tahun XX, 2004, hal 40.

⁵ "Laporan Tahunan", (http://www.depkop.go.id/phoca/download/Laporan_Tahunan/lap%20tahunan%202011.pdf, diakses 17 April 2013).

⁶ Jaka Sriyana, Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif-79, Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul.

perkembangannya juga mengalami berbagai kendala, baik itu dari dalam maupun dari luar.

B. Permasalahan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki satu keunggulan dibanding wilayah lain berkaitan dengan perkembangan industri kreatif ini, yaitu SDM yang berkualitas. SDM Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mendukung perkembangan industri kreatif di wilayah ini. Kategori yang cukup berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain di bidang kerajinan, IT, dan desain. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terdapat industri ekonomi kreatif adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta masih di kisaran 0,18 persen dari 78.455 unit usaha industri ekonomi kreatif. Menurut Kepala Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan industri ekonomi kreatif Daerah Istimewa Yogyakarta masih lambat. Dari sekitar 80 ribu industri di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sekitar 0,23 persen yang merupakan industri ekonomi kreatif.⁷ Dan memang di bidang tersebut merupakan bidang yang paling banyak digeluti oleh pengusaha UMKM. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. potensi yang di miliki oleh UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM.
3. kebijakan usaha apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam pengembangan UMKM.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kebijakan dan Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia

UMKM memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa⁸

bahwa “regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena dengan adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Definisi merupakan dasar dari formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak, ada dua tujuan mengenai definisi UMKM; yaitu untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta tujuan yang berkaitan dengan pembinaan.

Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UMKM. Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing lembaga, namun kalangan yang terlibat dengan kelompok UMKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, dan para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga berdampak pada kesulitan dalam mendata dengan tingkat akurasi optimal dan konsisten, mengukur sumbangan UMKM bagi perekonomian, dan merancang regulasi/kebijakan yang fokus dan terarah. Ketidakpastian

⁷ Ivan Aditya, “Pertumbuhan Industri Kreatif Perlu Digenjot”, (<http://krjogja.com/read/144216/pertumbuhan-industri-kreatif-perlu-digenjot.kr>, 24 September 2012, diakses 1 Oktober 2012).

⁸ Harefa, Mandala, “Kebijakan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Peranannya Dalam Perekonomian”, *Jurnal Kajian*, 14(2), 2008, hal. 34.

definisi, secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi arah kebijakan, kewenangan dan tanggung jawab dari pihak yang seharusnya terlibat dan menjadikan risiko ketidakpercayaan pada akhirnya. Oleh karena itulah, maka peraturan dan pengaturan regulasi menyangkut UMKM harus diharmonisasi.⁹

Beberapa lembaga atau instansi bahkan Undang-Undang (UU) memberikan definisi (UKM).¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Perindustrian tahun 1993, UKM didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, memiliki total aset tidak lebih dari Rp600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

B. Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia

Pengelolaan UMKM di Indonesia dilakukan di bawah Kemenkop dan UKM. Dalam rangka

mewujudkan pengembangan UMKM di Indonesia, Kemenkop dan UKM memiliki beberapa strategi. Di dalam rencana strategisnya tahun 2010-2014, dijelaskan bahwa arah kebijakan yang dikeluarkan memiliki beberapa fokus yang berkaitan dengan UMKM, yaitu peningkatan iklim usaha yang kondusif (pengembangan peraturan dan perundang-undangan yang memudahkan, pembentukan forum dan peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kemampuan dan kualitas aparat, pengembangan model teknologi untuk mendukung UMKM, dan lain-lain), peningkatan akses terhadap sumber daya produktif (penguatan permodalan UMKM, pengupayaan penurunan suku bunga pinjaman bagi UMKM, restrukturisasi usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitas investasinya, dan pengembangan sistem bisnis), pengembangan produk dan pemasaran (pemanfaatan ilmu dan teknologi, penguatan jaringan usaha dalam dan luar negeri, dan fasilitasi promosi), dan peningkatan daya saing SDM (pengembangan kewirausahaan, manajerial, keahlian teknis, dan kemampuan dasar).

Selain fokus strategi tersebut, kebijakan Kemenkop dan UKM juga dimaksudkan untuk mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kementerian, dan mengembangkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

Di samping program-program yang dijalankan oleh Kemenkop dan UKM, beberapa lembaga lain di Indonesia juga melakukan usaha untuk membantu perkembangan UMKM. Sebagai contoh, Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang salah satunya bertujuan untuk membantu akses pendanaan bagi UMKM. Kebijakan ini tertuang baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi yang Dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 6,9 juta jiwa. Sementara itu, potensi daerah Yogyakarta dapat tumbuh dikarenakan sebagai:

- daerah tujuan wisata yang sangat potensial.
- pusat kerajinan.
- pusat kebudayaan.
- pusat pendidikan.

Sedangkan potensi perdagangan non migas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah komoditas unggulan pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan perindustrian misalnya

⁹ Bank Indonesia, "Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia", 2011.

¹⁰ "Keragaman Definisi UKM di Indonesia", (<http://infoukm.wordpress.com/2008/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/>, diakses 3 Maret 2013).

pangan, kerajinan dan industri kreatif (*fashion*, kerajinan, dan IT). Komoditas yang diekspor dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya adalah produk-produk dari komoditas unggulan tersebut. Lihat Tabel 2 berikut:

Saat ini, industri kreatif juga dikembangkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Industri kreatif banyak didominasi oleh para pengusaha UMKM ini berpusat di pasar kerajinan tangan, kerajinan, desain, *fashion*, jasa komputer dan perangkat lunak. Yogyakarta yang

Tabel 2. Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2011
(Volume: juta kg, Nilai: juta USD)

No.	Komoditas	2008		2009		2010		2011	
		Vol.	Nilai	Vol.	Nilai	Vol.	Nilai	Vol.	Nilai
1.	Pakaian jadi tekstil	2,57	33,90	1,35	27,70	3,73	42,16	1,78	47,07
2.	Mebel kayu	11,35	24,28	8,71	18,67	8,58	18,19	0,39	21,75
3.	Sarung tangan kulit	0,35	16,93	0,27	11,35	0,33	17,24	6,97	16,38
4.	STK sintetis	0,21	6,94	0,27	9,18	0,38	14,64	0,46	16,21
5.	Kerajinan kertas	1,67	4,20	1,17	2,90	1,94	6,02	1,31	3,93
6.	Kerajinan kayu	2,22	5,14	1,87	4,96	1,45	4,15	4,96	4,49
7.	Kerajinan batu	8,06	3,47	5,52	3,74	6,38	4,05	0,00	0,00
8.	Teh hijau/hitam	1,56	1,75	1,83	2,85	2,21	3,99	1,00	2,06
9.	Minyak kenanga	0,03	0,30	0,23	1,73	0,38	3,37	0,22	3,85
10.	Produk tekstil lainnya	0,25	0,71	0,17	0,86	0,57	3,36	0,32	2,14
11.	Kulit disamak	0,22	6,69	0,14	3,34	0,26	2,89	0,56	2,34
12.	Atsiri daun cengkeh	0,42	3,08	0,39	2,63	0,20	2,34	0,34	6,91
13.	Arang briket	0,19	0,96	3,38	1,90	4,18	2,20	2,34	1,24
14.	Kerajinan kulit	0,16	1,26	0,09	1,02	0,28	1,68	0,21	1,74
15.	STK komb. poliurethan	0,06	2,70	0,09	3,47	0,04	1,64	0,00	0,12
16.	Kerajinan perak	0,05	1,38	0,01	1,58	0,02	1,40	0,16	1,80
17.	Papan kemas	0,59	1,02	0,13	0,23	0,45	1,12	0,98	2,48
18.	Kerajinan bambu	0,38	0,75	0,35	0,60	0,44	0,98	0,36	0,72
19.	Lampu	0,28	1,51	0,28	1,29	0,13	0,83	0,08	0,49
20.	Kerajinan tanah liat	1,15	0,99	0,83	0,85	0,70	0,68	0,85	0,89
Sub Total		31,58	117,00	27,08	95,85	32,55	132,93	23,23	136,61
Komoditas lainnya		9,00	13,25	3,62	12,85	1,98	7,30	3,44	7,80
Total		40,58	130,25	30,70	108,70	34,53	140,23	26,67	144,41

Sumber: Dinas Perindagkop Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012.

Data Disperindagkoptan pada tahun 2010, menyebutkan setidaknya ada sekitar 17.679 pelaku UMKM di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut terdiri dari pelaku UMKM di bidang industri sebanyak 4.552 pelaku usaha, serta UMKM di bidang perdagangan dan jasa sebanyak 13.127 pelaku usaha. Sedangkan pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat ada sekitar 76,3 unit usaha yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah yaitu sebanyak 99 persen, dan 1 persen diisi oleh industri besar. Telah terjadi penurunan yang sangat besar dikarenakan adanya krisis ekonomi yang pernah melanda dunia dan juga bencana alam yang dialami oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.¹¹

memiliki SDM yang memadai sangat sesuai untuk mengembangkan industri kreatif dalam skala besar. Industri kreatif perlu mendapat dukungan karena dapat memberikan kontribusi ekonomi, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, akibat SDM yang memadai. Menciptakan inovasi dan kreativitas sebagai keunggulan kompetitif dari bangsa dan memberikan dampak sosial yang positif.

Dari jumlah keseluruhan UMKM, 90 persen di antaranya adalah pelaku usaha mikro yang hingga kini masih kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal serta strategi dan praktek pemasaran. Oleh sebab itu, mereka cenderung tak berkembang, bahkan seringkali gulung tikar atau sekadar berganti jenis usaha yang sesuai dengan tren pasar yang sedang terjadi untuk bertahan.

¹¹ Joko Widiyarso, "UMKM Terkendala Permodalan dan Pemasaran". (<http://gudeg.net/id/news/2010/04/5465/UMKM-Terkendala-Permodalan-dan-Pemasaran.html>, diakses 20 Maret 2013).

Pada umumnya, ada tiga institusi yang berperan dalam pembinaan UMKM, yaitu:

1. lembaga teknis yang bertugas mengembangkan produk, utilitas, kualitas SDM dan optimalisasi (lebih pada *business side*).
2. lembaga keuangan yang bertugas menyediakan dana secara profesional (*microfinance*). Keprofesionalan ini sering kali dikaitkan dengan pemberian dana kepada UMKM yang *bankable*, namun fakta di lapangan menyebutkan bahwa hampir 99 persen UMKM di Indonesia tidak memenuhi syarat tersebut.
3. lembaga pemasaran yang bertugas membantu memberi asistensi kepada UMKM dalam akses pasar dan pemasaran.

Dari ketiga lembaga yang seharusnya berperan dalam pengembangan UMKM, hanya dua lembaga yang tampak wujud kegiatannya. Sebagai contoh, beberapa program yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pembentukan lembaga teknis berupa Program Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil khusus golongan ekonomi lemah (BIPIK program) yang dimulai akhir tahun 1970an yang berkonsentrasi pada *technical assistance*. Program ini meyakini bahwa tanpa proses dan inovasi produk, mayoritas UMKM tidak akan mampu mengakomodasikan perubahan struktural yang terjadi di lingkungan ekonomi mereka.¹²

Saat ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan ekspor dan impor yaitu: TPS (Tempat Penimbunan Sementara) yang berada di areal Bandara Internasional Adi Sutjipto dan *Inland Port* yang berada di daerah Kabupaten Bantul.

B. Permasalahan yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM

Beberapa masalah yang dihadapi oleh para pengusaha UKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Bantul antara lain: (1) pemasaran, (2) modal dan pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) pemakaian bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal.¹³

Menurut Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat kendala dalam meningkatkan produktifitas perdagangan dari hasil UKM, seperti:

1. kendala dari dalam negeri
 - a. produksi yang belum optimal hal ini disebabkan belum kontinuitasnya bahan baku.
 - b. masih rendahnya sistem sarana distribusi.
 - c. rendahnya standarisasi mutu produk.
2. kendala dari luar negeri
 - a. maraknya lalu lintas barang *illegal* (penyelundupan) dan semakin ketatnya persaingan di pasar ekspor pasca kuota dihapuskan.
 - b. terbatasnya infrastruktur ekspor seperti pelabuhan muat, bandara internasional, kawasan industri yang belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas ekspor *processing zone* (EPZ) dan *container yard* (CY).
 - c. permesinan pada umumnya relatif sudah tua sehingga kualitas yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar ekspor.
 - d. belum optimalnya lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - e. masih tingginya ketergantungan bahan baku/penolong impor.
 - f. terbatasnya pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar, kompetensi manajemen ekspor, promosi ekspor masih kurang.
 - g. kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan di dalam negeri belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
 - h. ekspor non migas masih bertumpu kepada keunggulan *comparative* yang seharusnya bertumpu kepada kemampuan inovasi, daya kreasi, dan profesionalisme SDM.
 - i. semakin maraknya atribut ekspor (*barrier to trade*) dari negara mitra tujuan ekspor, dengan alasan keamanan, lingkungan dan perlindungan produksi dalam negeri.

Dalam mengembangkan usahanya para pengusaha kecil mikro dan menengah mengalami banyak kendala, baik secara internal maupun eksternal. Kendala eksternal yang dihadapi pelaku usaha antara lain:

- a. fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- b. keterbatasan masalah infrastruktur, yang antara lain pelabuhan muat ekspor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada, keterbatasan fasilitas telepon, listrik yang semuanya menyebabkan tingginya biaya ekspor.

¹² Ni Putu Wiwin Setyari, "Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia", (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses 3 Maret 2013).

¹³ *Op.Cit.*, Simposium Nasional 2010.

- c. kondisi perekonomian global yang masih belum membaik.
Di tahun 2012 kinerja ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sama dengan tahun 2011 yaitu sebesar 4 persen. Kondisi terutama dipengaruhi oleh proses penyelesaian krisis hutang yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini akan menurunkan pesanan importir dari Amerika dan Eropa.
- d. kurangnya promosi produk.
- e. kurangnya daya saing produk.
Masalah daya saing menjadi lebih berat bagi pelaku ekspor karena ketidak pastian ongkos produksi yang tinggi, yang antara lain sebagai akibat naiknya harga minyak.
- f. rendahnya kualitas SDM.
Meskipun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum mempunyai kemampuan SDM yang cukup tinggi, namun untuk UKM masih tergolong kurang dalam penguasaan teknologi, kemampuan menangkap keinginan pasar, (kurangnya jiwa *sense of entrepreneur*, cepat puas dengan yang dihasilkan sekarang, padahal pasar sangat dinamis yang setiap saat keinginannya berubah), makin melemahnya minat generasi muda untuk menggeluti bidang kerajinan. Pengaruh penguasaan teknologi yang masih terbatas adalah tidak efisiennya produk yang pada gilirannya akan berpengaruh pada harga yang tidak dapat bersaing sehingga akan mengurangi posisi tawar di pasar internasional yang semakin kompetitif.
- g. kurangnya sarana dan prasarana.
Pelabuhan udara Adisutjipto, walaupun telah berstatus sebagai bandara internasional, namun operasionalnya belum optimal sebagai tempat shipment bagi barang ekspor, apalagi frekuensi penerbangan ke luar negeri, masih jauh dari harapan, sehingga untuk *shipment* barang ekspor yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan *delivery* belum bisa terlayani. Di samping itu, tidak adanya jaminan *connecting flight* ke negara tujuan ekspor, menyebabkan keraguan eksportir untuk *shipment* melalui Adisutjipto.
- h. kurangnya iklim usaha yang kondusif.
Permasalahan yang dihadapi adalah menyangkut keamanan berusaha yang belum terjamin, kurangnya efektifnya peraturan pemerintah, tidak stabilnya kondisi makro ekonomi, rendahnya kepastian hukum, prosedur perijinan yang panjang dan lama, masalah perburuhan serta keterbatasan program pembiayaan riil dan masih tingginya suku bunga pinjaman.
Dalam hal pemasaran dan permodalan selama ini masih menjadi permasalahan klasik yang selalu

menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini karena keterbatasan dalam agunan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan permodalan dari pihak bank.

Pemkot Yogyakarta berinisiatif untuk memberikan jalan bagi UMKM khususnya pelaku usaha mikro yang rata-rata bermodal Rp50 juta untuk memperkuat permodalan serta memperbaiki pemasaran produk mereka dengan bantuan pelaku usaha menengah hingga pelaku usaha besar. Menurut Kepala Seksi Kajian dan Pengembangan UMKM, Disperindagoptan Kota Yogyakarta, program sosial perusahaan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan bisa dialihkan untuk memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal permodalan dan pemasaran. Dalam pelaksanaannya, akan dilakukan secara selektif untuk memilih pelaku UMKM yang akan diberikan bantuan dan dilakukan dimasing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta. Kegiatan CSR tersebut diikuti oleh sejumlah perusahaan di Kota Yogyakarta seperti Progo, Mirota, Giant, Superindo, dan lain-lain.¹⁴

Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebuah kawasan industri kerajinan yang bernama Kasongan tepatnya di Kabupaten Bantul. Kawasan ini biasanya juga dikenal dengan klaster Kasongan yang juga merupakan wilayah pemukiman para pembuat barang-barang yang kini terkenal dengan hasil gerabah atau keramik yang menggunakan tanah liat sebagai bahan baku. Pasar ekspor terbesar Kasongan selama ini adalah negara Uni Eropa. Produk gerabah Kasongan mampu bersaing di pasar ekspor karena punya ciri khas dalam desainnya.¹⁵

Komoditas tersebut sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh ketersediaan bahan baku sehingga banyak produsen yang menghentikan pasokan bahan bakunya, selain itu jarak untuk memperoleh bahan baku juga jauh, mahal biaya transportasi dan juga akibat gempa bumi yang pernah melanda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 masih menyisakan beberapa masalah di antaranya kredit macet. Walaupun saat ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki fasilitas yang menunjang ekspor impor hasil UMKM, namun nyatanya fasilitas-fasilitas tersebut tidak memiliki infrastruktur yang memadai sehingga kurang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Selain itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga belum memiliki kawasan industri yang dilengkapi

¹⁴ "UMKM Terkendala Permodalan dan Pemasaran", (<http://gudeg.net/id/news/2010/04/5465/UMKM-Terkendala-Permodalan-dan-Pemasaran.html>, diakses 3 Maret 2013).

¹⁵ Irdiyanti, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor; Studi Kasus: Klaster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global", *Jurnal Transnasional*, 3(2), 2012, hal. 2.

dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.¹⁶

Dalam hal promosi, para pengusaha UMKM masih berusaha sendiri-sendiri. Mereka mengeksport sendiri hasil kerajinan melalui jasa kargo dan mendapat persaingan yang cukup ketat antara pengusaha, namun setiap pengusaha sudah mempunyai pelanggan dari luar negeri masing-masing, biasanya mereka percaya pada satu galeri. Masalah lain yang dihadapi adanya ketergantungan pemasaran produk melalui sistem order/pemesanan. Hal ini menjadi masalah khususnya pengusaha yang ada di level bawah, seperti penurunan jumlah pesanan sehingga kerugian besar akan dialami oleh pengusaha tersebut. Hal tersebut dapat diperparah apabila harga bahan baku tidak stabil atau bahkan sedang mahal dikarenakan sesuatu hal, seperti apresiasi nilai mata uangnya terhadap rupiah.

Tantangan baru yang masih dihadapi para pelaku industri kecil adalah permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).¹⁷ Masalah yang dihadapi dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya disebabkan belum tersedianya teknologi, biaya untuk pengadaan teknologi seperti komputer dan internet masih terbilang mahal, sumber daya manusia yang bisa menggunakannya masih terbatas dan masih banyak yang menganggap belum memerlukan bantuan teknologi dalam mengembangkan inovasi dan meningkatkan pendapatan.¹⁸ Masalah pengembangan teknologi juga menjadi pengaruh yang dominan terhadap kinerja UMKM. Masih digunakannya teknologi tradisional yang bersifat manual mengakibatkan tingkat produktifitas dan efisiensi rendah. Pengembangan teknologi tidak semata-mata dikarenakan faktor keterbatasan modal namun juga keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi yang sesuai dan tepat guna.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung dan Mengembangkan UMKM di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi tersebut, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya. Untuk mengembangkan UMKM tentu

saja tidak hanya dibebankan pada UMKM sendiri, namun harus memperoleh dukungan seluruh *stakeholders*. Dukungan termaksud diharapkan datang dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Di samping itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM dan usaha dari UMKM sendiri.

Salah satu bentuk proteksi yang dilakukan pemerintah terhadap pengembangan UKM adalah apa yang tercantum pada dua Undang-Undang (UU) yang terkait dengan UKM yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Lebih menarik lagi karena Undang-Undang tentang Persaingan Usaha muncul setelah Indonesia dihantam badai krisis yang menjadi arena pengujian ketanggungan masing-masing skala usaha.

Di dalam Undang-Undang Usaha Kecil tersebut secara jelas dinyatakan betapa diperlukannya tindakan untuk melindungi UKM dari persaingan yang tidak adil serta perlunya usaha untuk mengembangkannya. Misalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, perlindungan terhadap pelaksanaan program kemitraan di mana usaha besar dipaksa bermitra dengan UKM. Sementara dalam Pasal 50 butir (h) dan (i) Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Persaingan Usaha ini ternyata koperasi dan UMKM tidak tercakup di dalamnya. Kedua UU ini menyatakan bahwa salah satu tugas pemerintah dalam pengembangan sektor ekonomi adalah untuk memberikan perlindungan perundangan dan usaha pengembangan bagi koperasi dan UKM. Dasar pemikiran UU tersebut menggambarkan bahwa undang-undang dapat memiliki peran penting dalam mendukung usaha besar, menengah, kecil, dan koperasi dalam bersaing di pasar yang sama tetapi harus dapat melindungi UKM.¹⁹

Adapun beberapa kebijakan usaha dari sudut pandang usaha kecil dan menengah domestik yang sering menjadi perhatian, seperti dalam hal mendirikan usaha (*starting a business*), mengurus izin untuk mendirikan bangunan (*dealing with construction permits*), dan mendaftarkan properti (*registering property*).

Dukungan sepenuhnya tidak berarti pemerintah melakukan intervensi langsung di semua aspek bisnis UKM, melainkan dalam bentuk penciptaan suatu lingkungan berusaha yang kondusif sehingga UKM mampu melakukan pemberdayaan secara optimal. Pengalaman di banyak negara, termasuk

¹⁶ KPPBC TMP B Yogyakarta. Persepsi Bea dan Cukai Mengenai Gambaran Potensi Volume Perdagangan Non Migas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 2012.

¹⁷ Ekspose buku Profil Potensi Investasi DIY, "Profil Industri Kreatif", (http://www.jogjainvest.jogjaprovo.go.id/id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=38, diakses 3 Maret 2013).

¹⁸ *Op.Cit.*, Simposium Nasional 2010.

¹⁹ Mangara Tambunan dan Ubaidillah, "Memposisikan Usaha Kecil Menengah dalam Persaingan Pasar Global", Smecda, (http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi%2023/mangara%20tambunan.7.htm, diakses 25 April 2013).

Indonesia, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UKM terjadi lewat dua jalur, yaitu jalur tidak langsung (makro), misalnya lewat kebijakan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, dan lain-lain), dan jalur langsung (mikro) yaitu lewat kebijakan UKM. Namun, banyak kasus yang menunjukkan bahwa bagaimanapun bagusnya formulasi dan implementasi kebijakan UKM, semua ini tidak akan berarti sama sekali jika kebijakan ekonomi makro bersifat *distorsif*.²⁰

Peraturan-peraturan yang meningkatkan kegiatan usaha dan peraturan-peraturan yang menghambatnya. Peraturan-peraturan yang mempengaruhi 3 tahap kehidupan usaha diukur di tingkat daerah di Indonesia, yaitu mendirikan usaha, mengurus izin-izin mendirikan bangunan (IMB), dan pendaftaran properti. Indikator-indikator tersebut dipilih karena mencakup wilayah-wilayah yurisdiksi atau praktik setempat. Indikator-indikator tersebut dipergunakan untuk mengidentifikasi reformasi kebijakan usaha dan ruang lingkup efektivitas reformasi kebijakan usaha tersebut dalam menyederhanakan prosedur, mengurangi waktu, dan mengurangi biaya untuk menjalankan kegiatan usaha.

Menurut penelitian, permasalahan yang dihadapi industri kecil antar kelompok industri mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan yang menonjol adalah kenaikan harga faktor produksi yang memaksa mereka menaikkan harga jual produk. Masalah yang lain adalah menurunnya tingkat produksi dan *employment*.²¹

Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif selama ini tidak berada pada suatu instansi tertentu, cenderung tersebar pada berbagai instansi. Dalam RPJMN tujuan dari menciptakan iklim usaha tersebut adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan usaha, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perizinan/

pendirian usaha, dan partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan UMKM.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strateginya menguatkan pondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.

Kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kegiatan impor, ekspor dan cukai (dalam dan luar negeri) yaitu tentang perijinan terpadu satu atap sehingga pengurusan perijinan semakin mudah. Kantor tersebut beralamat di Komplek THR jalan Brigjen Katamso Yogyakarta (Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu/GP2T). Dengan masuknya investasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, penggunaan kemajuan teknologi, meningkatkan devisa ekspor dan pendapatan masyarakat serta menyumbang pendapatan daerah. Tujuan dibentuknya Gerai P2T untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan, profesional, partisipatif, kesamaan hak dan akuntabel, serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Dengan cakupan pelayanan sesuai dengan Pergub Nomor 36 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu mencakup 12 sektor meliputi penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup, pendidikan, dengan 64 jenis perizinan dan non perizinan.

Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan kebijakan dan strategi UMKM di antaranya yaitu:²²

- a. bidang koperasi dan UMKM yaitu program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, program peningkatan kualitas kelambagaan koperasi.
- b. penanaman modal
 - 1) program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
 - 2) program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

²⁰ Tulus Tambunan, "Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan Prospeknya", *Jurnal Manajemen dan Usahawan*, 31(7), 2002, hal. 3-15, (http://pdeb.fe.ui.ac.id/pdeb/pdeb/savvyware/digitallibrary/modules/search/search.php?menu=browse&level=detail&pk_resource=5&period=2002&volume=Vol.%2031,%20No.%2007&id=629, diakses 4 Maret 2013).

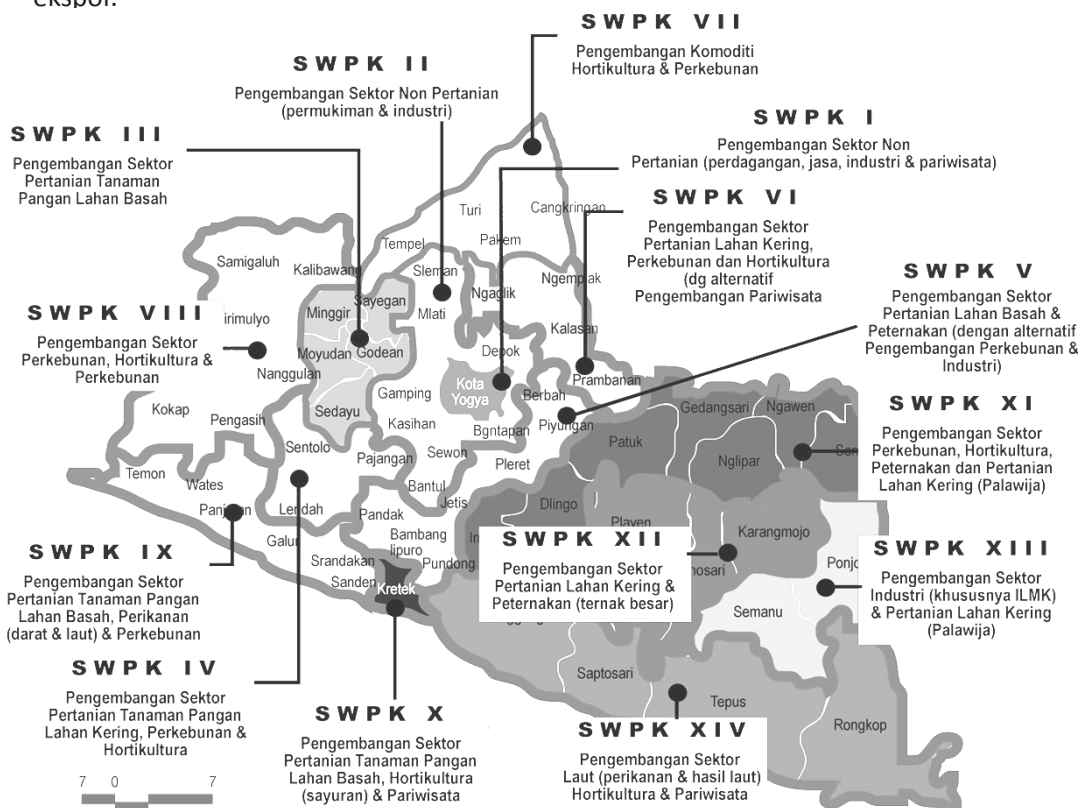
²¹ Hamid, Edy Suandi dan Susilo, Y. Sri, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 2011, hal. 46.

²² "Kebijakan Pemerintah Provinsi DIY". (<http://www.dprd-diy.go.id>, diakses 3 Maret 2013).

c. perdagangan

- 1) program peningkatan kerja sama perdagangan internasional.
- 2) program peningkatan dan pengembangan ekspor.

Untuk menunjang pengembangan UMKM maka direncanakan pengembangan kawasan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 16 klaster, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: KPPBC TMP B Yogyakarta, 2012.

Gambar 1. Kluster Pembangunan Kawasan, Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Yogyakarta Tahun 2012

- 3) program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- 4) program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Menurut Biro Administrasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para pengusaha mikro kecil dan menengah menghadapi beberapa kesulitan di lapangan yang berkaitan dengan semakin maraknya kemunculan pasar modern. UMKM banyak tersebar di pasar-pasar tradisional yang otomatis akan bersaing dengan pasar modern, sehingga dalam menyusun peraturan perlu diperhitungkan rasio antara pasar tradisional dengan pasar modern di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak mematikan pertumbuhan para pengusaha UMKM. Adapun ketidaknyamanan kemitraan antara UMKM dengan pasar modern yang sudah diatur dengan peraturan menteri perdagangan dianggap tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, misalnya UMKM yang memasukkan barang tidak dipungut biaya tapi ternyata dipungut, apabila produk UMKM dititipkan di pasar modern maka untuk pembayaran sangat sulit untuk ditagih.

Beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.²³

1. program pengembangan industri kecil dan menengah.
2. program pengembangan sentra-sentra industri potensial.
3. program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.
4. program peningkatan kemampuan teknologi industri.
5. program pembinaan dan pengembangan industri kreatif.
6. program penataan struktur industri.
7. program peningkatan kerjasama perdagangan internasional.
8. program peningkatan dan pengembangan ekspor.
9. program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
10. program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

²³ Renstra DIY, 2009-2013.

11. program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif.
12. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
13. program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
14. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Strategi Umum Pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁴

1. mengoptimalkan pemanfaatan aparat yang tersedia dalam melayani dunia usaha serta pengguna teknologi informasi dalam meraih peluang pasar.
2. mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah lainnya dalam peningkatan pengembangan usaha.
3. memanfaatkan hasil penelitian teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan dunia usaha.
4. meningkatkan SDM dalam pengelolaan usaha dan teknologi proses.
5. meningkatkan kemampuan dalam mengakses informasi pasar melalui teknologi informasi.
6. mengembangkan jaringan kerjasama untuk memperkuat daya saing dan posisi tawar.
7. memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam yang tersedia dan meningkatkan akses sumber daya alam dari daerah lain.
8. meningkatkan promosi dalam rangka mengembangkan perluasan pasar dalam dan luar negeri.
9. meningkatkan peran aktif aparat dalam menyebarluaskan dan pemahaman tentang isu global dan penanganan serta solusinya
10. meningkatkan penyebar luasan dan pemahaman kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral.
11. mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif.
12. meningkatkan akses UKM ke sumber daya produktif.
13. memantapkan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
14. memberdayakan usaha mikro.
15. meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat.
16. mengembangkan kewirausahaan dan daya saing UMKM.

Dalam menganalisis faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dicermati faktor kekuatan dan faktor kelemahan, sebagai berikut :²⁵

- a. Kekuatan
 1. tersedianya SDM yang cukup potensial.
 2. terdapatnya berbagai lembaga *research and development*, baik milik pemerintah maupun swasta.
 3. dikuasainya teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan sektor Indagkop dan UKM.
 4. sarana dan prasarana untuk pengembangan ekonomi cukup baik.
 5. dalam melaksanakan pembangunan indagkop dan UKM dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari ketiga sektor tersebut.
- b. Kelemahan
 1. komposisi dan kualifikasi pendidikan aparatur di beberapa strata belum seimbang dan belum sesuai.
 2. pola pembinaan dan pengembangan karier belum jelas dan belum diterapkan analisa jabatan.
 3. sarana dan prasarana terbatas dan perkantoran belum terpusat.
 4. otonomi daerah mengakibatkan program sektor indagkop dan UKM kurang berjalan secara optimal ditandai dengan tumpang tindihnya kebijakan antar daerah, antar daerah dan pusat.
 5. aspek monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan baik kualitas dan kuantitasnya guna meningkatkan kinerja dan transparansi, sehingga menunjang tercapainya tujuan rencana strategis dan terwujudnya *good governance*.
 6. keterbatasan kualitas SDM di lingkungan UMKM dalam pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran serta akses permodalan.
 7. keterbatasan kemampuan UKM dalam memanfaatkan informasi teknologi sebagai sarana akses pasar yang berkembang pesat.
 8. lemahnya UMKM dalam menjalin kerjasama untuk memperkuat eksistensi dan posisi tawar dengan pihak pembeli.
 9. keterbatasan SDA yang mendukung perkembangan sektor Indagkop dan UMKM.
- c. Peluang
 1. berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam pengembangan industri perdagangan.
 2. ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.
 3. otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro UMKM.

²⁴ *Ibid.*, hal. 19-20.

²⁵ *Ibid.*, hal. 27-28.

4. biaya produksi sektor UKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah lain.
 5. tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
 6. daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
- d. Tantangan
1. optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan UKM.
 2. optimalisasi pengembangan UKM yang berkesinambungan sehingga daya saing tetap tinggi.
 3. optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreativitas.
 4. maraknya peredaran barang ilegal/produk impor.
- e. Isu Strategis
1. perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi.
 2. peningkatan pengembangan industri kreatif dan bisnis kreatif dengan optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreativitas.
 3. mendorong peningkatan ekspor dengan optimalisasi promosi untuk penanganan dampak krisis global.
 4. mendorong penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka peningkatan daya saing.
 5. peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang impor dan barang ilegal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdagangan dalam negeri sangat potensial karena letak Daerah Istimewa Yogyakarta yang strategis sebagai penghubung antara wilayah Jateng Selatan, yaitu Magelang, Klaten, Purworejo, dan sekitarnya, dan Jatim wilayah Barat yaitu Pacitan dan hal ini membuat potensi dan peluang yang cukup besar terbuka bagi UMKM di wilayah Yogyakarta. Potensi itu didukung dengan jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3,5 juta orang merupakan potensi pasar yang cukup bagus karena banyak UMKM yang sangat kreatif dalam mengembangkan usahanya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat berkembangnya industri kreatif yang sangat mendukung untuk kegiatan perdagangan, memiliki infrastruktur jalan yang cukup memadai. Selain itu, terdapat bandara internasional, kereta api yang menghubungkan wilayah barat dengan wilayah timur, transportasi jalan darat yang cukup mendukung. Namun untuk pemberdayaan di usaha mikro masih

membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah daerah, sehingga bisa dapat berkembang ke jenjang usaha berikutnya (menuju tingkat usaha kecil, menengah dan besar).

Kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kegiatan perdagangan hasil UMKM ke luar negeri adalah:

1. masih rendahnya minat para eksportir dalam menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di Bandara Internasional Adi Sutjipto, hal ini dikarenakan mahalnya biaya pengiriman melalui bandara dan masih terbatasnya infrastruktur bandara.
2. belum tersedianya kawasan industri berserta infrastrukturnya sehingga pengembangan industri masih belum optimal memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah.

B. Saran

Di era perdagangan bebas atau globalisasi, maka sebaiknya pengembangan dan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk melakukan proses produksi yang produktif dan efisien, yang tentunya memiliki kualitas unggul yang perlu didukung oleh kebijakan yang mumpuni dan memudahkan. Hal itu bisa berupa kebijakan ekonomi makro, kebijakan sektoral, dan kebijakan pembangunan daerah yang saling melengkapi, selaras, dan sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Machmud, Zakir. *Rekomendasi Kebijakan UKM di Indonesia*. Friedrich-Naumann-Stiftung Fur die Freiheit, Jakarta, 2011.
- Sjaifudian, Hetifah. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akatiga, 1995.
- Renstra DIY. 2009-2013, Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Yogyakarta.

Jurnal dan Makalah:

- Hamid, Edy Suandi dan Y. Sri Susilo. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), Juni, hal. 45-55, 2011.
- Irdayanti. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor, Studi Kasus: Klaster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global", *Jurnal Transnasional*, 3(2), Februari 2012.
- Tambunan, Tulus. "Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan Prospeknya", *Jurnal Manajemen dan Usahawan*, 31(07), 2002, hal 3-15, (http://pdeb.fe.ui.ac.id/pdeb/pdeb/savvyware/digitallibrary/modules/search/search.php?menu=browse&level=detail&pk_resource=5&period=2002&volume=Vol.%2031,%20No.%2007&id=629, diakses 4 Maret 2013).
- Setyari, Ni Putu Wiwin. "Dinamika Pengembangan UKM di Indonesia", (<http://ejournal.unud.ac.id>, diakses 3 Maret 2013).
- Sriyana, Jaka. Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif-79, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul", 2010.
- Bank Indonesia. "Kajian Akademik Peningkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia", 2011.

Majalah:

- Hafsah, Mohammad Jafar. "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)". *Infokop*, Nomor 25 Tahun XX, 2004.

Artikel dalam Internet:

- "DB2012 Report". (http://www.kppod.org/datapdf/laporan/DB2012Report_Ind.pdf, diakses 3 Maret 2013).
- "Ekspose Buku Profil Potensi Investasi DIY-Profil Industri Kreatif". (http://www.jogjainvest.jogjapro.go.id/id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=38, diakses 3 Maret 2013).

"Kebijakan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Membaik". (http://bkppm.surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=142%3Akebijakan-usaha-bagi-usaha-kecil-dan-menengah-di-indonesia-membaik&catid=34%3Aberita-media-massa&Itemid=66&lang=in, diakses 3 Maret 2013).

"Kebijakan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Membaik". (<http://www.doingbusiness.org/indonesia>, diakses 4 Maret 2013).

"Kebijakan Pemerintah Provinsi DIY". (<http://www.dprd-diy.go.id>, diakses 3 Maret 2013).

"Keragaman Definisi UKM di Indonesia". (<http://infoukm.wordpress.com/2008/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/>, diakses 3 Maret 2013).

"Laporan Tahunan". (http://www.depkop.go.id/phocadownload/Laporan_Tahunan/lap%20tahunan%202011.pdf, diakses 17 April 2013).

Sriyana, Jaka. "Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul". (http://dppm.uui.ac.id/dokumen/dikti/files/DPPM-UUI_09._79-103_STRATEGI_PENGEMBANGAN_USAHA_KECIL_DAN_MENENGAH_%28UKM%29.pdf, diakses 3 Maret 2013).

"UKM Terkendala Permodalan dan Pemasaran". (<http://gudeg.net/id/news/2010/04/5465/UKM-Terkendala-Permodalan-dan-Pemasaran.html>, diakses 3 Maret 2013).

Wahyono, Budi. "Kebijakan Pemerintah terhadap UKM". (<http://pend-ekonomi.blogspot.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html>, diakses 4 Maret 2013).

Widiyarso, Joko. "UMKM Terkendala Permodalan dan Pemasaran". (<http://gudeg.net/id/news/2010/04/5465/UMKM-Terkendala-Permodalan-dan-Pemasaran.html>, diakses 20 Maret 2013).